

Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Kompensasi Eksekutif dan *Integrated Reporting*: Peran Komite CSR dari Perspektif Sektor Perbankan di ASEAN

Muhammad Ghaza Faid Ahdasi dan Evy Rahman Utami*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

evy.rahman@umy.ac.id

DOI: [10.18196/rabin.v9i1.26653](https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26653)

SITASI:

Ahdasi, M. G. F., & Utami, E. R. (2025).
Kompensasi Eksekutif dan Integrated
Reporting: Peran Komite CSR dari
Perspektif Sektor Perbankan di ASEAN.
Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,
9(1), 187-203.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

06 Jan 2025

Revisi:

24 Jan 2025

Revisi:

18 Feb 2025

Diterbitkan:

31 Mar 2025



Abstrak

Latar Belakang: Industri perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penyediaan pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, bank dituntut untuk menyajikan informasi yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kinerja keberlanjutan melalui *integrated reporting* (IR).

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kompensasi eksekutif dan komite CSR terhadap IR, dengan komite CSR sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tiap negara (ASEAN) yang secara konsisten menerbitkan IR dan laporan tahunan selama periode 2021-2023. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap IR tetapi komite CSR tidak berpengaruh terhadap IR. Selain itu, komite CSR sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan kompensasi eksekutif terhadap IR.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam sehingga penelitian ini menggunakan variabel moderasi komite CSR untuk mengembangkan model penelitian. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, komite CSR dapat berperan sebagai pengawasan internal. Komite CSR memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan tidak hanya menggambarkan pencapaian keuangan, tetapi mencerminkan komitmen keberlanjutan perusahaan, termasuk praktik etis, perlindungan lingkungan, dan kontribusi sosial.

Kata kunci: *Integrated Reporting*; Kompensasi Eksekutif; Komite CSR; *Sustainability*; Tata Kelola Perusahaan

Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, regulator telah berusaha meningkatkan transparansi sektor keuangan dengan menetapkan berbagai persyaratan pengungkapan, khususnya untuk bank (Mio dkk., 2022). *Integrated reporting* (IR) menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Cooray dkk., 2020). IIRC (2013) menjelaskan bahwa IR bertujuan untuk menunjukkan tentang nilai, strategi, kinerja, prospek

jangka panjang perusahaan serta menekankan penciptaan nilai berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan. Selain itu, IR bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan melalui narasi nilai yang lebih strategis dan relevan (De Villiers dkk., 2017; Navarrete-Oyarce dkk., 2022). Industri perbankan mempunyai peran yang unik dalam pembangunan berkelanjutan karena bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam (Maryantia dkk., 2024) dan keberlanjutan dalam rantai ekonomi (Dafermos dkk., 2018). Lebih lanjut, saat ini bank mulai peduli pada pertumbuhan yang berkelanjutan karena hal itu bisa menambah nilai dan membantu kemajuan masyarakat (Moyo dkk., 2014; Suryati & Murwaningsari, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap pengungkapan IR pada industri perbankan di Indonesia, serta menganalisis apakah keberadaan komite CSR memperkuat hubungan tersebut.

Di kawasan ASEAN, penerapan IR masih berada pada tahap awal (Petcharat & Zaman, 2019) meskipun pengungkapannya terus meningkat. Malaysia telah mendorong penerbitan laporan tahunan terintegrasi oleh beberapa perusahaan (Malaysia, 2018), sementara Singapura mendukung IR melalui pembentukan Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) sejak 2013 (Abdullah dkk., 2017). Di Indonesia, OJK mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017. Thailand dan Filipina juga menunjukkan perkembangan awal dalam mengadopsi IR (Chapple & Moon, 2005; Chua & Hae-Young, 2024).

Perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan cenderung mengaitkan kompensasi eksekutif karena mereka percaya bahwa manajemen harus dibayar untuk mengambil risiko yang lebih besar sebagai bagian dari inisiatif sosial jangka panjang (Berrone & Gomez-Mejia, 2009; Li, 2020).

Keberadaan komite tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam struktur dewan menjadi salah satu elemen tata kelola yang dinilai dapat memperkuat transparansi pelaporan. Komite CSR berperan dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam strategi dan pelaporan perusahaan (Aladwey dkk., 2022; Michelon & Parbonetti, 2012). Konsep efektivitas komite CSR memiliki banyak aspek, seperti ukuran, independensi, dan ketekunan. Wang et al. (2020) menjelaskan bahwa keberadaan dan kinerja komite CSR meningkatkan kualitas IR. Selain itu, Li et al. (2023) menemukan bahwa kinerja lingkungan berhubungan dengan efektivitas komite, yang diukur dengan skor gabungan dari berbagai karakteristik. Hal ini menunjukkan bahwa komite CSR yang efektif dapat meningkatkan IR yang lebih luas.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan IR, kompensasi eksekutif, komite CSR menunjukkan hasil yang beragam, seperti Li dkk. (2023), Qaderi dkk. (2022), dan Wang dkk. (2020) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki komite CSR yang aktif dan independen cenderung mengungkapkan informasi IR secara lebih komprehensif. Komite ini dianggap mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi penghubung antara strategi keberlanjutan perusahaan dan pelaporan eksternal. Namun, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sun et dkk. (2022) dan Velte and Stawinoga (2020) tidak berpengaruh antara komite CSR dan IR karena peran komite CSR bisa menjadi

simbolis atau sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tanpa benar-benar mempengaruhi praktik pelaporan. Hal ini dapat terjadi jika komite tidak memiliki otoritas yang cukup atau jika tidak terdapat integrasi antara tujuan keberlanjutan dan strategi inti perusahaan.

Faktor eksternal seperti tekanan pemangku kepentingan, kepemilikan institusional, dan budaya organisasi sering kali menjadi pendorong utama dalam adopsi praktik IR. Namun, struktur tata kelola internal seperti komite CSR tetap memegang peranan penting, khususnya sebagai variabel moderasi yang memperkuat efektivitas mekanisme insentif manajerial terhadap IR. Komite CSR bertindak sebagai penghubung antara strategi keberlanjutan perusahaan dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, memastikan bahwa kompensasi eksekutif tidak hanya mendorong pencapaian kinerja finansial, tetapi juga memotivasi perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang tercermin dalam kualitas IR (Bifulco dkk., 2023). Dengan fungsi pengawasan dan advisori yang dimilikinya, komite CSR dapat memoderasi hubungan antara kompensasi eksekutif dan IR melalui peningkatan akuntabilitas serta pelibatan dalam penetapan indikator keberlanjutan yang menjadi dasar pemberian insentif (Bifulco dkk., 2023). Elbardan dkk. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan komite CSR memperkuat hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan nilai perusahaan serta menurunkan risiko informasi, menegaskan peran pengawasan strategis yang dimilikinya. Di sisi lain, (Aldogan Eklund & Pinheiro, 2024) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG tinggi dan kebijakan kompensasi berbasis CSR lebih cenderung membentuk komite CSR, yang menunjukkan bahwa struktur ini bukan hanya pelengkap tata kelola, melainkan mekanisme yang efektif dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan keberlanjutan. Temuan ini mendukung peran komite CSR dalam memoderasi hubungan kompensasi eksekutif terhadap IR.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya yang masih jarang mempertimbangkan peran komite CSR sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kompensasi eksekutif dan pengungkapan laporan terintegrasi. Sebagian besar studi terdahulu hanya menyoroti pengaruh langsung dari faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan (Sun dkk., 2022; Velte & Stawinoga, 2020), tanpa mengkaji bagaimana keberadaan struktur tata kelola yang spesifik seperti komite CSR dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Oleh karena itu, dengan memasukkan komite CSR sebagai variabel moderasi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang mekanisme tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui IR.

Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif teori agensi dan teori pemangku kepentingan. Teori-teori ini menekankan pentingnya manajemen mengungkapkan informasi kepada prinsipal untuk mengurangi asimetri informasi dan menyeimbangkan semua kepentingan *stakeholder* (Freeman, 1984; Meckling & Jensen, 1976). Teori agensi menyoroti hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana asimetri informasi dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pemberian kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja sosial atau pelaporan terintegrasi dapat mendorong manajemen untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengungkapan informasi (Bhaskar dkk., 2023; Flammer dkk., 2019). Teori pemangku

kepentingan (stakeholder theory) menekankan pentingnya perusahaan memperhatikan dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya pemegang saham, tetapi karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Komite CSR berperan sebagai mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa kebijakan dan pelaporan terintegrasi perusahaan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder. Keberadaan komite CSR terbukti meningkatkan kualitas pelaporan CSR dan mendorong adopsi standar pelaporan seperti GRI, yang pada akhirnya memperkuat nilai dan kinerja perusahaan (Aldogan Eklund & Pinheiro, 2024; Elbardan dkk., 2023; Nandy dkk., 2023; Velte & Stawinoga, 2020). Komite CSR berperan penting dalam membantu dewan menangani kompleksitas strategi berkelanjutan dengan memberikan saran dan masukan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan pemangku kepentingan secara seimbang, khususnya terkait isu lingkungan, sosial, dan daya saing perusahaan (Burke dkk., 2019; Salvioni & Gennari, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan IR, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam laporan tahunan mereka. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan komite CSR melemahkan hubungan antara kompensasi eksekutif dan pengungkapan IR.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk perkembangan literatur akuntansi, khususnya terkait pengungkapan. Kedua, bagi investor, penelitian ini menawarkan kesempatan untuk menilai bagaimana laporan terintegrasi perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa persepsi positif perusahaan melalui pendekatan laporan terintegrasi, membantu pengelolaan dampak lingkungan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Laporan terintegrasi, yang mencakup penyajian informasi keuangan dan non-keuangan, memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan kinerja dan strategi jangka panjangnya. Terakhir, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi mengenai pengungkapan laporan terintegrasi oleh perusahaan di negara ASEAN dan keberadaan komite CSR.

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan bahwa mekanisme kompensasi eksekutif berbasis kinerja dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme kompensasi eksekutif berbasis kinerja dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengurangi ketidaksepakatan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik modal (prinsipal). Hal ini karena struktur perusahaan memisahkan pengendalian dan kepemilikan. Untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, pemberian kompensasi yang

dikaitkan langsung dengan pencapaian kinerja tertentu diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Kholid & Prayoga, 2022; Olaniyi, 2019). Dengan kata lain, kompensasi yang dirancang secara tepat berfungsi sebagai alat penyalur insentif yang mendorong manajemen untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, yang mencakup peningkatan kualitas pelaporan melalui praktik pelaporan yang lebih terintegrasi.

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya peran dewan dalam menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Dalam konteks ini, peran dewan direksi menjadi krusial untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang beragam melalui pengambilan keputusan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Pembentukan komite CSR merupakan salah satu mekanisme strategis yang dapat memperkuat fungsi pengawasan dewan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan operasional perusahaan (Burke dkk., 2019; Salvioni & Gennari, 2019). Komite ini tidak hanya berperan dalam merumuskan dan mengevaluasi inisiatif sosial dan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan perusahaan selaras dengan harapan para pemangku kepentingan serta standar etika dan keberlanjutan global. Dengan demikian, keberadaan komite CSR berkontribusi pada peningkatan efisiensi tata kelola perusahaan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam merespons tekanan dari lingkungan internal maupun eksternal, termasuk tuntutan regulasi, ekspektasi pasar, serta perubahan sosial dan lingkungan (Burke dkk., 2019; Salvioni & Gennari, 2019).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Integrated Reporting*

Peran strategis kompensasi eksekutif adalah mendorong transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk dalam konteks pelaporan integrasi dan pelaporan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen harus mengungkapkan lebih banyak informasi agar tidak terjadi asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Pengungkapan sukarela sering kali melampaui norma, menunjukkan komitmen manajemen terhadap tata kelola yang akuntabel (IFA, 2017; Zamil dkk., 2023). Insentif berbasis kinerja terbukti berguna untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham dan mendorong pengungkapan informasi strategis dalam kerangka teori agensi (Choi & Kim, 2017; Qaderi dkk., 2022). Strategi keberlanjutan perusahaan semakin penting ketika kontrak kompensasi menggabungkan faktor sosial dan lingkungan (Deegan & Islam, 2012).

Al-Shaer and Zaman (2019) dan Utomo et al. (2021) menjelaskan bahwa pemberian insentif kepada eksekutif, terutama CEO, meningkatkan kualitas dan intensitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Kompensasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan keberlanjutan dapat mendorong eksekutif untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi bisnis. Ketika kompensasi bergantung pada indikator non-keuangan yang tercermin dalam laporan keberlanjutan atau laporan

terintegrasi, eksekutif akan lebih terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena sistem insentif yang mengaitkan imbalan dengan pencapaian indikator keberlanjutan mendorong manajemen untuk lebih proaktif dalam mengelola isu-isu ESG (environmental, social, and governance) dan melaporkannya secara lebih lengkap dan relevan (Eccles dkk., 2014; Garcia-Sanchez dkk., 2021; Melloni, 2018). Oleh karena itu, semakin besar proporsi kompensasi maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam laporan terintegrasi terutama jika dikaitkan dengan indikator keberlanjutan (Haque & Ntim, 2020; Zhang dkk., 2023). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Integrated Reporting*.

Pengaruh Komite CSR terhadap *Integrated Reporting*

Komite CSR secara strategis bertanggung jawab untuk menangani masalah keberlanjutan dan meningkatkan kualitas pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi. Komite CSR berfungsi sebagai perpanjangan tangan dewan direksi untuk menyeimbangkan kebutuhan informasi berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam hal masalah lingkungan dan sosial (García-Sánchez dkk., 2019). Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menjelaskan sebuah tata kelola perusahaan harus memenuhi semua kepentingan pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Komite CSR bertanggung jawab untuk membuat strategi keberlanjutan dan memastikan bahwa informasi transparan kepada pemangku kepentingan (Aldogan Eklund & Pinheiro, 2024; Michelon & Parbonetti, 2012). IR dapat bermanfaat jika ada komite CSR karena pelaporan terintegrasi mencakup aspek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola selain informasi keuangan (Aladwey dkk., 2022; Churet & Eccles, 2014).

Qaderi dkk. (2022) dan Aladwey dkk. (2022) menjelaskan keberadaan komite CSR dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbukaan pelaporan keberlanjutan karena berperan sebagai pengawasan, partisipasi aktif, dan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan laporan. Keterlibatan komite CSR membantu perusahaan menyusun laporan yang menunjukkan hubungan antara strategi, kinerja, dan prospek jangka panjang yang merupakan inti dari IR (De Villiers dkk., 2017; IIRC, 2013). Komite CSR berfungsi sebagai instrumen penting dalam tata kelola yang mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam mengelola dan mengungkapkan masalah ESG secara menyeluruh. Komite CSR tidak hanya berfungsi sebagai penasihat dalam hal keberlanjutan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan bahwa informasi non-keuangan disampaikan secara akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan (Dragomir & Dumitru, 2023). Selain itu, komite CSR dapat meningkatkan pengungkapan IR dengan mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan *selective disclosure* atau *greenwashing* (Ma & Ahmad, 2024). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota komite CSR biasanya terkonsentrasi pada akuntabilitas sosial perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (Tambunan dkk., 2022). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komite CSR berpengaruh positif terhadap *Integrated Reporting*.

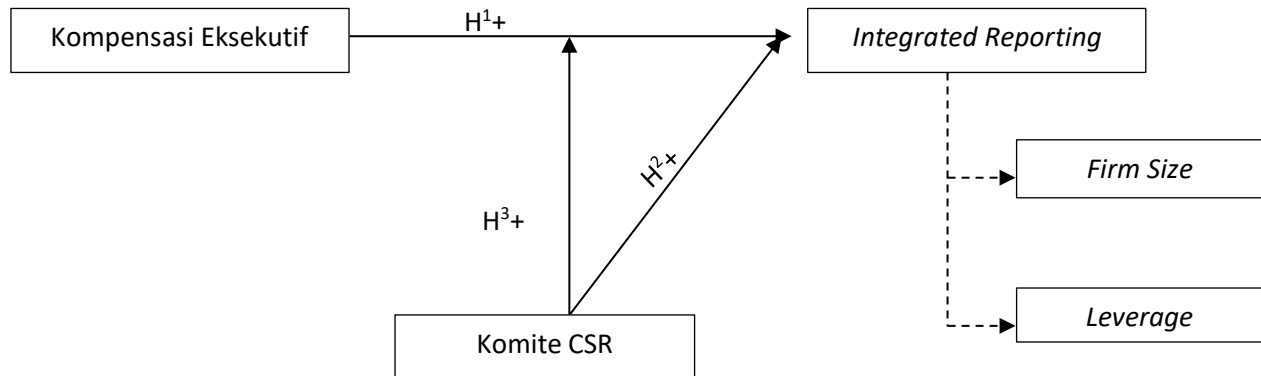
Pengaruh Komite CSR memperkuat hubungan antara Kompensasi Eksekutif terhadap *Integrated Reporting*

Komite CSR berperan penting untuk mengelola risiko dan peluang keberlanjutan serta memastikan pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (García-Sánchez dkk., 2019). Dalam kerangka teori agensi, komite ini dipandang sebagai mekanisme tata kelola yang efektif untuk mereduksi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal, serta menjembatani strategi keberlanjutan dengan insentif manajerial (Derchi dkk., 2021). Komite CSR dan kompensasi eksekutif berperan saling melengkapi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang berkontribusi terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan. Al-Shaer and Zaman (2019) menemukan bahwa perusahaan dengan komite CSR cenderung memasukkan indikator keberlanjutan dalam kontrak kompensasi CEO. Hal ini memperkuat gagasan bahwa keduanya bekerja bersama dalam mendorong pelaporan yang lebih terintegrasi dan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Nandy et al. (2023) juga menyoroti bahwa integrasi antara komite CSR dan kompensasi berbasis ESG mendukung adopsi standar pelaporan global seperti GRI, yang berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan dalam kontrak kompensasi CEO, serta memiliki komite CSR yang independen dan terorganisir, cenderung menghasilkan pelaporan terintegrasi yang lebih andal dan sesuai dengan standar global seperti GRI (Ferri & Maber, 2013; Nandy dkk., 2023; Peters & Romi, 2015). Komite CSR dalam konteks ini berperan sebagai mekanisme pengawasan dan pengarah strategis yang dapat memperkuat keterkaitan antara insentif manajerial dan pelaporan yang berkualitas (Michelon & Parbonetti, 2012; Peters & Romi, 2015). Dengan kata lain, komite CSR memastikan bahwa eksekutif mempertimbangan ESG ke dalam pengambilan keputusan strategis dan melaporkan secara transparan dan terstruktur ketika indikator keberlanjutan dimasukkan ke dalam sistem kompensasi eksekutif (Liang & Renneboog, 2017). Sistem kompensasi eksekutif yang diikuti dengan pengawasan komite CSR dan mengaitkan imbalan dengan kinerja ESG dapat mendorong eksekutif untuk lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang yang tercermin dalam IR (Aldogan Eklund & Pinheiro, 2024). Komite CSR meningkatkan kualitas IR dan mengurangi potensi *greenwashing* dengan memastikan bahwa kompensasi eksekutif berbasis keberlanjutan mendorong manajemen untuk bertindak secara strategis terhadap masalah ESG (Ma & Ahmad, 2024). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Komite CSR memperkuat hubungan kompensasi eksekutif terhadap *Integrated Reporting*.

Berdasarkan pengembangan hipotesis, disajikan model penelitian ini pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang sudah terdaftar di bursa efek yang terdapat di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) untuk periode 2021-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan terintegrasi dan laporan tahunan (annual report). Data diperoleh melalui akses langsung ke situs web bursa efek tiap negara. Kriteria pemilihan sampel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek tiap negara	267
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan secara lengkap	15
3.	Data <i>Outliers</i>	48
Jumlah sampel yang digunakan		210

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel utama, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Definisi operasional variabel dan proksi ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen	
<i>Integrated Reporting</i>	Mengacu pada penelitian (Abogazia dkk., 2022) menggunakan 44 komponen kerangka IR berdasarkan (IIRC, 2013)
Variabel Independen	
Kompensasi Eksekutif	Logaritma total gaji dan bonus tahunan mengacu penelitian (Hanafi & Harto, 2014)
Variabel Moderasi	
Komite CSR	Rasio jumlah pelatihan dewan direksi dengan jumlah anggota dewan (Peters & Romi, 2014)
Variabel Kontrol	
<i>Firm Size</i>	Menggunakan nilai dari total aset (Setiadharmas & Machali, 2017)
<i>Leverage</i>	Menggunakan <i>debt to equity ratio</i> (Zelalem, 2020)

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dan untuk menguji pengaruh variabel moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Peneliti menggunakan Eviews versi 12 untuk melakukan pengolahan data. Sebelum melakukan analisis regresi, penulis telah melakukan serangkaian uji asumsi klasik. Hasil dari seluruh pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari permasalahan asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Persamaan regresi yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan 1 : $IR = a + \beta_1. Comp + \beta_2. CSR + \beta_3 SIZE + \beta_4 DER + e$

Persamaan 2 : $IR = a + \beta_1. Comp + \beta_2. CSR + \beta_3. Comp.CSR_{com} + \beta_4 SIZE + \beta_5 DER + e$

Dimana *IR* adalah *Integrated Reporting*; *a* untuk Constanta; β untuk Koefisien regresi, *Comp* untuk variabel Kompensasi Eksekutif, *CSR* untuk *CSR Committee*, *SIZE* untuk Firm Size, *DER* untuk pengukuran variabel *Leverage*, dan *e* adalah standar *Error*.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Statistik

Penelitian ini mengkaji pengungkapan *Integrated Reporting* (IR) sebagai variabel dependen, sementara variabel independennya mencakup kompensasi eksekutif. Selain itu, komite CSR digunakan sebagai variabel moderasi untuk menganalisis hubungan antar variabel. Statistik deskriptif dari setiap variabel tersebut disajikan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran umum tentang data yang digunakan.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Integrated Reporting (IR)</i>	210	0,613	0,977	0,867	0,079
<i>Compensation (COMP)</i>	210	5,802	11,438	8,789	1,372
Komite CSR (<i>CSR</i>)	210	0,250	4,750	1,028	0,476
Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>)	210	12,557	20,144	16,360	1,818
<i>Leverage (DER)</i>	210	0,061	3,040	0,239	0,329

Berdasarkan Tabel 3, jumlah sampel adalah 210. IR memiliki nilai minimum 0,613, nilai maksimum 0,977, dan rata-rata sebesar 0,867. Rata-rata pengungkapan IR cukup tinggi. Variabel Kompensasi Eksekutif (COMP) menunjukkan nilai minimum 5,802, maksimum 11,438, dengan rata-rata 8,789, ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memberikan kompensasi dalam kisaran yang moderat hingga tinggi. Komite CSR (CSR), nilai minimumnya adalah 0,250, nilai maksimum 4,750, dan rata-rata sebesar 1,028. Secara umum keberadaan dan peran komite CSR masih tergolong lemah. Untuk variabel kontrol, SIZE nilai minimumnya adalah 12,557 dan maksimumnya adalah 20,144 dengan rata-rata 16,360, ini menunjukkan rata-rata perusahaan berukuran menengah sampai besar. Kemudian DER nilai minimumnya adalah 0,061 dan maksimumnya adalah 3,040, dengan rata-rata 0,239, ini menunjukkan sebagian besar perusahaan menggunakan pendanaan yang konservatif, atau beroperasi dengan struktur modal yang stabil dan hati-hati.

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa H1 terdukung ($sig < 0,05$ dan *coefficient* 0,020) yang ditunjukkan pada persamaan 1. Namun, komite CSR tidak berpengaruh positif terhadap IR sehingga H2 tidak terdukung ($sig > 0,05$). Lebih lanjut, persamaan 2 menunjukkan bahwa komite CSR memperlemah hubungan antara kompensasi eksekutif dan IR sehingga H3 tidak terdukung ($sig < 0,05$ dan *coefficient* -0,021).

Tabel 4 Regresi Linear Berganda

Variabel	N	Persamaan 1			Persamaan 2		
		<i>Coefficient</i>	<i>t</i>	<i>sig.</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t</i>	<i>sig</i>
Constant	210	-0,0939	-0,3030	0,7623	-0,1386	-0,4541	0,6504
Compensation (COMP)	210	0,0201	1,9862	0,0490	0,0462	3,1469	0,0020
CSR Committee	210	0,0025	0,3750	0,7082	0,1771	2,4423	0,0159
COMP*CSR	210				-0,0213	-2,4173	0,0170
SIZE	210	0,0476	2,3125	0,0222	0,0369	1,7810	0,0772
Leverage (DER)	210	0,0055	0,5965	0,5518	0,0108	-2,4173	0,0170
Adjusted R Square		0,9230			0,9230		

Kompensasi Eksekutif terhadap *Integrated Reporting*

Integrated reporting (IR) menawarkan pelaporan yang berfokus pada strategi jangka panjang, orientasi masa depan, dan integrasi informasi keuangan dan non-keuangan. Pendekatan pelaporan ini didasarkan pada prinsip seperti konektivitas, materialitas, keandalan, dan komparabilitas (IIRC, 2013). Untuk menyelaraskan kepentingan manajer

dengan tujuan pemilik perusahaan, kebijakan kompensasi eksekutif sangat penting terutama ketika berkaitan dengan tujuan non-keuangan seperti modal manusia, intelektual, sosial, dan alam (Melloni, 2018). Garcia-Sanchez dkk. (2021) menjelaskan perusahaan yang menerapkan IR dan mengintegrasikan metrik ESG dalam kompensasi eksekutif cenderung melaporkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan pelaporan yang lebih berkualitas.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan asimetri informasi, di mana manajer sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini mendorong pentingnya peningkatan pengungkapan oleh manajer guna mempersempit kesenjangan informasi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam situasi seperti ini, kompensasi eksekutif menjadi mekanisme yang berguna untuk mengatur kepentingan manajemen dengan tujuan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan kompensasi yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kualitas pengungkapan untuk mendukung nilai jangka panjang perusahaan (Melloni, 2018; Zimon dkk., 2022).

Komite CSR terhadap *Integrated Reporting*

Komite CSR adalah alat strategis untuk manajemen dalam meningkatkan jumlah dan kualitas pelaporan terintegrasi, terutama yang berkaitan dengan aspek tata kelola, lingkungan, dan sosial (Qaderi dkk., 2022). Komite ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan dan membantu memenuhi harapan pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan (Baraibar-Diez & D. Odriozola, 2019; García-Sánchez dkk., 2019). Selain itu, komite CSR membantu menetapkan standar pelaporan yang lebih transparan seperti GRI, yang menguntungkan citra dan kredibilitas perusahaan (Vigneau dkk., 2015). Namun, bertentangan dengan temuan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa komite CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IR. Terbatasnya pengaruh komite CSR terhadap IR dapat disebabkan oleh dominasi orientasi pelaporan terhadap kepentingan investor, yang tidak selalu selaras dengan tujuan CSR (Ackers & Grobbelaar, 2022). Pengaruh komite CSR terhadap IR mungkin terbatas oleh legitimasi yang rendah, posisi kelembagaan yang lemah dalam struktur tata kelola, dan fokus perusahaan pada kepentingan pemangku kepentingan tertentu (Velte & Stawinoga, 2020). Dalam beberapa kasus, pembentukan komite CSR cenderung bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan substantif dalam pengambilan keputusan strategis.

Komite CSR memperlemah hubungan Kompensasi Eksekutif terhadap *Integrated Reporting*

Komite CSR meningkatkan pengungkapan IR dan menjembatani hubungan antara karakteristik dewan dengan IR (Qaderi dkk., 2022) tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite CSR memperlemah hubungan antara kompensasi eksekutif dan IR. Hal ini selaras dengan temuan Yang (2023) yang menyatakan bahwa atribut dewan seperti

ukuran dan independensi memiliki pengaruh lebih besar terhadap strategi IR dibandingkan komite CSR. Bahkan dalam konteks kompensasi, kualitas IR lebih banyak dipengaruhi oleh keahlian CSR dalam komite kompensasi daripada oleh keberadaan komite CSR. Al-Shaer and Zaman (2019) menunjukkan terdapat hubungan positif antara IR dan pencantuman indikator keberlanjutan dalam kompensasi, tidak ditemukan interaksi signifikan yang menunjukkan peran moderasi komite CSR dalam hubungan tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa komite CSR tidak memiliki peran yang signifikan sebagai pengatur hubungan antara kompensasi eksekutif dan laporan keberlanjutan atau laporan terintegrasi. Hal ini dapat disebabkan karena eksekutif telah memberikan lebih banyak perhatian kepada komite CSR untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan. Dalam konteks ini, insentif kompensasi yang ditujukan untuk mendorong peran aktif eksekutif dalam IR menjadi kurang efektif, karena sebagian tanggung jawab strategis telah didistribusikan kepada komite CSR (Damayanti dkk., 2022). Selain itu, pendekatan normatif dan kepatuhan yang sering digunakan oleh komite CSR cenderung menghasilkan pelaporan yang lebih simbolik daripada integratif. Akibatnya, dorongan berbasis insentif untuk kualitas IR tidak didukung secara efektif (Salvioni & Gennari, 2019). Di satu sisi, jika komunikasi dengan anggota dewan lainnya sulit, penerapan komite CSR dalam aspek komitmen keberlanjutan tidak menguntungkan kebutuhan pemangku kepentingan (Velte & Stawinoga, 2020).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap IR. Hal ini mengindikasikan bahwa kompensasi eksekutif mekanisme untuk memotivasi agar semakin luas mengungkapkan informasi. Sementara itu, komite CSR tidak memiliki pengaruh terhadap IR dan memperlemah antara kompensasi eksekutif dan IR. Sebaliknya, bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap IR tetapi leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IR menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi lebih luas.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang komprehensif serta referensi yang berharga bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dewan direksi, dalam memahami dan mengembangkan kebijakan kompensasi dan IR. Perusahaan diharapkan lebih menekankan pentingnya laporan terintegrasi yang tidak hanya memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, tetapi juga memiliki relevansi strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap bagaimana IR dapat dikaitkan secara efektif dengan kebijakan kompensasi eksekutif sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pengungkapan yang lebih luas mengenai perusahaan dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, adopsi dan optimalisasi IR dapat menjadi instrumen yang mendukung terciptanya nilai jangka panjang bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, regulator perlu mengkaji dan meningkatkan peran strategis komite CSR.

Peneliti selanjutnya dapat diarahkan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang lebih relevan dalam mempengaruhi praktik IR, serta memperluas periode pengamatan dan cakupan data ke seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tiap negara. Selain itu, penting untuk meninjau kembali desain dan struktur komite CSR agar lebih efektif dalam mendorong pengungkapan pelaporan terintegrasi. Pengukuran komite CSR juga dapat dikembangkan dengan menggunakan proksi lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N. W., Husin, N. M., Salleh, S. M., Alrazi, B., Wahida Abdullah, N., Mat Husin, N., & Mohamad Salleh, S. (2017). Integrated reporting: A comparison between Malaysian and Singapore public listed companies. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 44. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.07.02.11>
- Ackers, B., & Grobbelaar, S. E. (2022). The impact of the integrated reporting framework on corporate social responsibility (CSR) disclosures—the case of South African mining companies. *Social Responsibility Journal*, 18(6), 1106-1127. <https://doi.org/10.1108/SRJ-12-2020-0508>
- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2019). CEO compensation and sustainability reporting assurance: Evidence from the UK. *Journal of Business Ethics*, 158, 233-252. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3735-8>
- Aladwey, L., Elgharbawy, A., & Ganna, M. A. (2022). Attributes of corporate boards and assurance of corporate social responsibility reporting: evidence from the UK. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 22(4), 748-780. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2021-0066>
- Aldogan Eklund, M., & Pinheiro, P. (2024). The determinants of corporate social responsibility (CSR) committee: executive compensation, CSR-based incentives and ESG performance. *Social Responsibility Journal*, 20(7), 1240-1255. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2022-0303>
- Baraibar-Diez, E., & D. Odriozola, M. (2019). CSR committees and their effect on ESG performance in UK, France, Germany, and Spain. *Sustainability*, 11(18), 5077. <https://doi.org/10.3390/su11185077>
- Berrone, P., & Gomez-Mejia, L. R. (2009). The pros and cons of rewarding social responsibility at the top. *Human Resource Management*, 48(6), 959-971. <https://doi.org/10.1002/hrm.20324>
- Bhaskar, R., Bansal, S., Abbassi, W., & Pandey, D. K. (2023). CEO compensation and CSR: economic implications and policy recommendations. *Economic Analysis and Policy*, 79, 232-256. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.06.016>
- Bifulco, G. M., Savio, R., Paolone, F., & Tiscini, R. (2023). The CSR committee as moderator for the ESG score and market value. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(6), 3231-3241. <https://doi.org/10.1002/csr.2549>
- Burke, J. J., Hoitash, R., & Hoitash, U. (2019). The heterogeneity of board-level sustainability committees and corporate social performance. *Journal of Business Ethics*, 154, 1161-1186. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3453-2>
- Chapple, W., & Moon, J. (2005). Corporate social responsibility (CSR) in Asia: A seven-country study of CSR web site reporting. *Business & Society*, 44(4), 415-441. <https://doi.org/10.1177/0007650305281658>

- Choi, B., & Kim, J. B. (2017). The Effect of CEO Stock-Based Compensation on the pricing of future earnings. *European Accounting Review*, 26(4), 651-679. <https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1175364>
- Chua, K. T., & Hae-Young, B. (2024). Impact of sustainability reporting initiatives on the financial performance of Philippine listed companies. *Environmental Economics*, 15(1), 130. [https://doi.org/10.21511/ee.15\(1\).2024.11](https://doi.org/10.21511/ee.15(1).2024.11)
- Churet, C., & Eccles, R. G. (2014). Integrated reporting, quality of management, and financial performance. *Journal of Applied Corporate Finance*, 26(1), 56-64. <https://doi.org/10.1111/jacf.12054>
- Cooray, T., Gunaratne, A. N., & Senaratne, S. (2020). Does corporate governance affect the quality of integrated reporting? *Sustainability*, 12(10), 4262. <https://doi.org/10.3390/su12104262>
- Dafermos, Y., Nikolaidi, M., & Galanis, G. (2018). Climate change, financial stability and monetary policy. *Ecological Economics*, 152, 219-234. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.011>
- Damayanti, A., Ulupui, I. G. K. A., & Muliastari, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(3), 744-765. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.12>
- De Villiers, C., Venter, E. R., & Hsiao, P. C. K. (2017). Integrated reporting: background, measurement issues, approaches and an agenda for future research. *Accounting & Finance*, 57(4), 937-959. <https://doi.org/10.1111/acfi.12246>
- Deegan, C., & Islam, M. A. (2012). Corporate commitment to sustainability—is it all hot air? An Australian review of the linkage between executive pay and sustainable performance. *Australian Accounting Review*, 22(4), 384-397. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2012.00177.x>
- Derchi, G.-B., Zoni, L., & Dossi, A. (2021). Corporate social responsibility performance, incentives, and learning effects. *Journal of Business Ethics*, 173(3), 617-641. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04556-8>
- Dragomir, V. D., & Dumitru, M. (2023). Does corporate governance improve integrated reporting quality? A meta-analytical investigation. *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1846-1885. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2022-1618>
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- Elbardan, H., Uyar, A., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2023). CSR reporting, assurance, and firm value and risk: The moderating effects of CSR committees and executive compensation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 53, 100579. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100579>
- Ferri, F., & Maber, D. A. (2013). Say on pay votes and CEO compensation: Evidence from the UK. *Review of Finance*, 17(2), 527-563. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs003>
- Flammer, C., Hong, B., & Minor, D. (2019). Corporate governance and the rise of integrating corporate social responsibility criteria in executive compensation: Effectiveness and implications for firm outcomes. *Strategic management journal*, 40(7), 1097-1122. <https://doi.org/10.1002/smj.3018>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder theory. *Journal of Management Studies*, 39(1), 1-21.
- Garcia-Sanchez, I.-M., Raimo, N., & Vitolla, F. (2021). CEO power and integrated reporting. *Meditari Accountancy Research*, 29(4), 908-942. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2019-0604>

- García-Sánchez, I. M., Gomez-Miranda, M.-E., David, F., & Rodríguez-Ariza, L. (2019). The explanatory effect of CSR committee and assurance services on the adoption of the IFC performance standards, as a means of enhancing corporate transparency. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 10(5), 773-797. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2018-0261>
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162-1172.
- Haque, F., & Ntim, C. G. (2020). Executive compensation, sustainable compensation policy, carbon performance and market value. *British journal of management*, 31(3), 525-546. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12395>
- IFA. (2017). *The Board of Directors and Integrated Reporting*. https://integratedreporting.ifrs.org/wp-content/uploads/2017/07/IFA_Reporting-Integre%CC%81-2017_EN.pdf
- IIRC. (2013). *Integrated Reporting: The International Framework*. . Integrated Reporting. <https://integratedreporting.ifrs.org/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kholid, A. W. N., & Prayoga, H. (2022). Remunerasi Eksekutif dan Nilai Perusahaan: dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 148-155. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i2.6748>
- Li, X. (2020). Literature review of executive compensation. *Journal of Service Science and Management*, 13(1), 153-167. <https://doi.org/10.4236/jssm.2020.131010>
- Li, Z., Jia, J., & Chapple, L. (2023). The corporate sustainability committee and its relation to corporate environmental performance. *Meditari Accountancy Research*, 31(5), 1292-1324. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2021-1341>
- Liang, H., & Renneboog, L. (2017). On the foundations of corporate social responsibility. *The journal of Finance*, 72(2), 853-910. <https://doi.org/10.1111/jofi.12487>
- Ma, Y., & Ahmad, M. I. (2024). Do board characteristics impact greenwashing? Moderating role of CSR committee. *Heliyon*, 10(20). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38743>
- Malaysia, B. (2018). *Introduction to the Integrated Reporting Framework*. <https://bursasustain.bursamalaysia.com/droplet-details/corporate-governance/introduction-to-the-integrated-reporting-framework>
- Maryantia, M., Abbas, M. H., & Tenrisau, M. A. (2024). Banking sustainability in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e2613-e2613. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2613>
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Melloni, G. (2018). Value creation, CEO incentives and remuneration: evidence from integrated reporting adopters.
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management & Governance*, 16, 477-509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- Mio, C., Agostini, M., & Panfilo, S. (2022). Bank risk appetite communication and risk taking: the key role of integrated reports. *Risk analysis*, 42(3), 634-652. <https://doi.org/10.1111/risa.13776>

- Moyo, J., Nandwa, B., Council, D. E., Oduor, J., & Simpasa, A. (2014). Financial sector reforms, competition and banking system stability in Sub-Saharan Africa. *New perspectives*, 14(1), 1-47.
- Nandy, M., Kuzey, C., Uyar, A., Lodh, S., & Karaman, A. S. (2023). Can CSR mechanisms spur GRI adoption and restore its lost value relevance? *Journal of Applied Accounting Research*, 24(4), 609-634. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2022-0068>
- Navarrete-Oyarce, J., Moraga-Flores, H., Gallegos Mardones, J. A., & Gallizo, J. L. (2022). Why integrated reporting? Insights from early adoption in an emerging economy. *Sustainability*, 14(3), 1695. <https://doi.org/10.3390/su14031695>
- Olaniyi, C. (2019). Asymmetric information phenomenon in the link between CEO pay and firm performance: An innovative approach. *Journal of Economic Studies*, 46(2), 306-323. <https://doi.org/10.1108/JES-11-2017-0319>
- Petcharat, N., & Zaman, M. (2019). Sustainability reporting and integrated reporting perspectives of Thai-listed companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(4), 671-694. <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2018-0073>
- Peters, G. F., & Romi, A. M. (2014). Does the voluntary adoption of corporate governance mechanisms improve environmental risk disclosures? Evidence from greenhouse gas emission accounting. *Journal of Business Ethics*, 125, 637-666. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1886-9>
- Peters, G. F., & Romi, A. M. (2015). The association between sustainability governance characteristics and the assurance of corporate sustainability reports. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34(1), 163-198. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50849>
- Qaderi, S. A., Ghaleb, B. A. A., Hashed, A. A., Chandren, S., & Abdullah, Z. (2022). Board characteristics and integrated reporting strategy: does sustainability committee matter? *Sustainability*, 14(10), 6092. <https://doi.org/10.3390/su14106092>
- Salvioni, D., & Gennari, F. (2019). Stakeholder perspective of corporate governance and CSR committees. *Symphony*, 1, 28-39. <https://doi.org/10.4468/2019.1.03salvioni.gennari>
- Setiadharmas, S., & Machali, M. (2017). The effect of asset structure and firm size on firm value with capital structure as intervening variable. *Journal of Business & Financial Affairs*, 6(4), 1-5. <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000298>
- Sun, Y., Xu, C., Li, H., & Cao, Y. (2022). What drives the innovation in corporate social responsibility (CSR) disclosures? An integrated reporting perspective from China. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100267. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100267>
- Suryati, S., & Murwaningsari, E. (2022). Pengaruh Green Competitive Advantage Dan Pelaporan Terintegrasi Terhadap Nilai Perusahaan. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 193-208. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.237>
- Tambunan, S., Siregar, A., Wijaya, M., & Pratama, I. (2022). The Impact of Corporate Governance On The Integrated Reporting Quality Of Indonesian Listed Firms: Moderating Role Of CSR Disclosure And Corporate Sustainability. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(4), 252-274.
- Utomo, S. D., Machmuddah, Z., & Hapsari, D. I. (2021). The role of manager compensation and integrated reporting in company value: Indonesia vs. Singapore. *Economies*, 9(4), 142. <https://doi.org/10.3390/economies9040142>
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2020). Do chief sustainability officers and CSR committees influence CSR-related outcomes? A structured literature review based on empirical-quantitative research findings. *Journal of Management Control*, 31(4), 333-377. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00308-x>
- Vigneau, L., Humphreys, M., & Moon, J. (2015). How do firms comply with international sustainability standards? Processes and consequences of adopting the global reporting

- initiative. *Journal of Business Ethics*, 131, 469-486. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2278-5>
- Wang, R., Zhou, S., & Wang, T. (2020). Corporate governance, integrated reporting and the use of credibility-enhancing mechanisms on integrated reports. *European Accounting Review*, 29(4), 631-663. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1668281>
- Yang, L. (2023). Compensation committee CSR-related expertise, CSR contracting quality, and performance implications. *Journal of management accounting research*, 35(3), 197-223. <https://doi.org/10.2308/JMAR-2022-047>
- Zamil, I. A., Ramakrishnan, S., Jamal, N. M., Hatif, M. A., & Khatib, S. F. (2023). Drivers of corporate voluntary disclosure: a systematic review. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(2), 232-267. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2021-0110>
- Zelalem, D. (2020). The impact of financial leverage on the performance of commercial banks: Evidence from selected commercial banks in Ethiopia. *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management*, 5(1), 62-68. <https://doi.org/10.11648/j.ijafm.20200501.16>
- Zhang, D., Pan, L., Liu, L., & Zeng, H. (2023). Impact of executive pay gap on environmental, social, and governance disclosure in China: Is there a strategic choice? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(5), 2574-2589. <https://doi.org/10.1002/csr.2503>
- Zimon, G., Arianpoor, A., & Salehi, M. (2022). Sustainability reporting and corporate reputation: the moderating effect of CEO opportunistic behavior. *Sustainability*, 14(3), 1257. <https://doi.org/10.3390/su14031257>